

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang kaya akan energi terutama gas alam. Indonesia merupakan negara ke 14 yang memiliki cadangan Gas Alam terbesar di Dunia, atau terbesar pertama di ASEAN yaitu sekitar 103,3 Triliun kaki kubik yang diperkirakan tidak akan habis dalam waktu lebih dari 60 tahun kedepan (BPS 2014). Jika dapat dikelola optimal oleh pemerintah Indonesia, maka Energi dari Gas Alam ini dapat digunakan sebagai alat pembangunan nasional terutama dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN

Masyarakat Ekonomi ASEAN (*Association of South East Asian Nations*) seperti yang telah sepakati di Pnom Phen, Kamboja pada 2012 oleh seluruh anggota ASEAN, akan resmi dimulai pada 31 Desember 2015. Penetapan hal ini dilakukan para pemimpin 10 negara ASEAN pada KTT ASEAN ke-21 di Kamboja. Desain Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) melingkupi 3 pilar yakni komunitas politik-keamanan, komunitas ekonomi dan komunitas sosial budaya. Dengan adanya MEA ini maka secara otomatis Negara ASEAN akan memiliki keterikatan dan bergerak bersama dalam mencapai satu visi, satu identitas dan komunitas.

Masyarakat Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Community/AEC) dibentuk untuk mewujudkan integrasi ekonomi ASEAN, yakni tercapainya wilayah ASEAN yang aman dengan tingkat dinamika pembangunan yang lebih tinggi dan terintegrasi, pengentasan masyarakat ASEAN dari kemiskinan, serta pertumbuhan ekonomi untuk mencapai kemakmuran yang merata dan berkelanjutan. Untuk itu MEA memiliki empat karakteristik utama, yaitu pasar tunggal dan basis produksi, kawasan ekonomi yang berdaya saing tinggi,

dan kawasan dengan pembangunan ekonomi yang merata, serta kawasan yang terintegrasi penuh dengan ekonomi global. (Kementerian Luar Negeri RI, 2014)

Tujuan diadakannya MEA ini untuk menciptakan ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi dimana terjadi arus barang, jasa, investasi, dan tenaga terampil yang bebas serta aliran modal yang lebih bebas. Adanya MEA ini bisa memacu pertumbuhan ekonomi pada khususnya di kawasan Asia Tenggara, serta akan memberikan kemudahan dan peningkatan akses pasar antar anggota ASEAN. Namun, Adanya MEA ini juga bisa mempengaruhi stabilitas ekonomi bagi negara anggota yang kurang mempersiapkan diri menghadapi kompetisi bebas antar anggota ASEAN ini. Sehingga diperlukan keseriusan dalam meningkatkan produktifitas dan sumberdaya negara kita, agar MEA bisa menjadi batu loncatan untuk mengembangkan potensi ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan negara kita. Salah satunya dalam sektor Gas, dalam hal ini adalah Perusahaan Gas Negara (PGN).

Seluruh masyarakat didorong dalam sebuah integrasi internasional untuk lebih memperluas hubungan dan kerjasama antar bangsa dunia. Pasar bebas merupakan dampak yang mengikuti globalisasi negara-negara ASEAN, dimana masyarakat ASEAN didorong untuk melakukan interaksi dan transaksi secara luas dalam berbagai bidang strategis. (Atep Abdurrofiq, 2014).

Dalam menghadapi perdagangan bebas yang diusung dalam agenda utama MEA ini, tentu Indonesia harus mempersiapkan diri sematang mungkin, untuk tidak hanya bertahan namun juga bersaing dan menyerang. Dibukanya perdagangan bebas regional ASEAN dapat menjadi “angin segar” sekaligus sebagai “angin topan” artinya, jika masyarakat dan pemerintah dapat bersinergi dengan baik, maka akan menguntungkan bagi kemajuan ekonomi Indonesia, namun sebaliknya, akan menjadi bumerang dimana posisi Indonesia, produk dalam negeri akan terus kalah bersaing dengan produk negara ASEAN lainnya.

Disatu sisi Indonesia perlu bersuka cita karena produknya akan leluasa melenggang ke negara ASEAN, disisi lain indonesia harus waspada karena persaingan terbuka ASEAN sudah didepan mata.

Pelaksanaan MEA berdampak pada penurunan biaya tarif ekspor-impor menjadi 0-5 persen serta penghapusan batasan kuantitatif dan hambatan non tarif lainnya. Dibukanya ruang-ruang perdagangan bebas dikawasan ASEAN diprediksi mampu mendorong hal positif bagi pembangunan ekonomi Indonesia, *pertama*, mendorong pendapatan negara menalalui eksport dan impor. *Kedua*, membuka peluang industrialisasi baru di kawasan Indonesia yang sempat lesu karena krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998. *Ketiga*, memperluas lapangan kerja profesional bagi ledakan generasi-generasi muda baru di Indonesia serta memberikan kesempatan berkarir diberbagai wilayah di ASEAN. (Atep Abdurrofiq, 2014)

Komunitas ASEAN (*ASEAN Community*) dibentuk dengan tujuan untuk lebih mempererat integrasi ASEAN dalam menghadapi perkembangan konstelasi internasional baik dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya maupun pertahanan dan keamanan.

Untuk membantu tercapainya integrasi ekonomi ASEAN melalui AEC, maka dibuatlah AEC Blueprint yang memuat empat pilar utama yaitu (1) ASEAN sebagai pasar tunggal dan berbasis produksi tunggal yang didukung dengan elemen aliran bebas barang, jasa, investasi, tenaga kerja terdidik dan aliran modal yang lebih bebas; (2) ASEAN sebagai kawasan dengan daya saing ekonomi tinggi, dengan elemen peraturan kompetisi, perlindungan konsumen, hak atas kekayaan intelektual, pengembangan infrastruktur, perpajakan, dan ecommerce; (3) ASEAN sebagai kawasan dengan pengembangan ekonomi yang merata dengan elemen pengembangan usaha kecil dan menengah, dan prakarsa integrasi ASEAN untuk negara-negara Kamboja, Myanmar, Laos, dan Vietnam; dan (4) ASEAN sebagai kawasan yang terintegrasi secara penuh dengan perekonomian global dengan elemen

pendekatan yang koheren dalam hubungan ekonomi di luar kawasan, dan meningkatkan peran serta dalam jejaring produksi global. (Atep Abdurrofiq, 2014)

KTT ke- 9 ASEAN di Bali tahun 2003 menghasilkan Bali Concord II yang menegaskan bahwa Komunitas Ekonomi ASEAN (AEC – Asean Economic Community) akan diarahkan kepada pembentukan sebuah integrasi ekonomi kawasan. Pembentukan biaya transaksi perdagangan, memperbaiki fasilitas perdagangan dan bisnis, serta meningkatkan daya saing sektor UKM. Disamping itu, pembentukan AEC juga akan memberikan kemudahan dan peningkatan akses pasar intra- ASEAN serta meningkatkan transparansi dan mempercepat penyesuaian peraturan- peraturan dan standarisasi domestik. (Ina Risdiani :2013)

PGN adalah BUMN Indonesia yang bergerak di sektor hilir gas bumi yang menyediakan dan mengembangkan dan memanfaatkan gas bumi untuk kebutuhan nasional, baik bagi industri, pembangkit listrik, transportasi maupun kebutuhan rumah tangga. Seiring kenaikan harga BBM, PGN mendukung penuh pemerintah mengkonversi BBM menuju Gas. PGN merupakan perusahaan yang bergerak di bidang transportasi dan distribusi gas bumi, yang menghubungkan pasokan gas bumi Indonesia dengan konsumen di seluruh penjuru nusantara. PGN memperkuat pondasi yang ada dan bertransformasi dari perusahaan transmisi dan distribusi gas bumi menjadi penyedia solusi energi terintegrasi, yang mendorong pemanfaatan gas bumi untuk kebutuhan masyarakat dan industri yang semakin meningkat. Seiring meningkatnya kebutuhan energi yang bersih dan terjangkau, PGN akan terus menggunakan keahlian dan pengalamannya untuk mengamankan sumber energi baru untuk memenuhi kebutuhan jangka panjang konsumen. (PGN :2015) Indonesia adalah pasar terbesar bagi anggota ASEAN, sehingga sangat mungkin bila Indonesia akan menjadi incaran pemasaran produk anggota ASEAN lain, terutama dalam produk kebutuhan sehari-hari, misalnya adalah kebutuhan Gas bagi industri maupun rumah tangga.

Dalam menghadapi kompetisi BUMN, tentu PGN harus menerapkan strategi khusus, serta pengembangan teknologi untuk membuatnya terus bertahan dalam era persaingan bebas nanti. Perusahaan Gas Negara (PGN), sebagai BUMN pengelola energi alternatif non fosil, menunjukkan komitmen mendukung industri nasional dalam menghadapi persaingan di era MEA nanti. Selama tahun 2014, PGN terus mengembangkan infrastruktur jaringan gas bumi untuk mengalirkan energi baik gas bumi ke berbagai segmen pelanggan, mulai dari rumah tangga, UKM, komersial, industri, pembangkit listrik dan transportasi. (Tajuk BUMN,2015)

Produk yang ditawarkan PGN adalah penyediaan gas melalui pipa-pipa yang dihubungkan langsung kepada konsumen. Seperti kita tahu bahwa masyarakat Indonesia masih sangat minim pengetahuannya mengenai gas pipa PGN ini. Masyarakat lebih cenderung menggunakan gas LPG yang harganya semakin naik dan terkadang harus mengalami kelangkaan di beberapa wilayah terutama disaat hari raya. Padahal masyarakat belum sepenuhnya menyadari bahwa gas pipa PGN harganya jauh lebih murah dari harga LPG, dan dinilai lebih praktis dan efisien, sebab konsumen akan secara otomatis terhubung dengan pipa seperti ketika kita berlangganan listrik PLN, tanpa harus menggotong tabung gas LPG kesana dan kemari. Cukup langsung menggunakan gas melalui pipa dan secara otomatis gas akan dapat dinikmati. Namun pengadaan awal jaringan pipa ke konsumen yang cukup mahal ternyata menjadi tantangan bagi PGN untuk memperkenalkan gas pipa kepada masyarakat. Meskipun beberapa wilayah seperti jabodetabek dan beberapa wilayah lain sudah mulai menggunakan pipa gas PGN. Jika dikalkulasi lebih detail sesungguhnya memang gas pipa PGN jauh lebih murah dan efisien dibanding gas LPG.

Dalam kiprahnya di Dunia Perminyakan Indonesia, PGN terus meningkatkan skala usahanya dengan mandiri. Salah satunya dengan pembangunan Infrastruktur Jaringan Pipa Gas oleh PGN sendiri tanpa membebani APBN Pemerintah. Kini PGN telah membangun Jaringan Infrastruktur Gas yang terintegrasi keseluruh nusantara dengan total 76% dari

seluruh infrastruktur gas yang ada di Indonesia. Hal ini yang menjadi salah satu keunggulan PGN dalam hal distribusi dan transmisi Gas di Indonesia.

Prestasi PGN dalam perannya sebagai BUMN Migas Indonesia dibuktikan dengan terus dibangunnya jaringan pipa gas secara mandiri oleh PGN, serta merambahnya usaha PGN ke sektor hulu dengan ditandatanganinya kerjasama PGN dengan Swift Energy Company untuk mengelola Blok Fasken, Texas, AS.

Komitmen PGN untuk mendukung ketahanan Energi Nasional disambut baik oleh Pemerintah Indonesia dengan rencana Pemerintah dalam hal ini komisi DPR RI untuk merevisi UU no 22 tahun 2001 tentang Minyak Bumi dan Gas yang salah satunya membahas mengenai Open Access Pipa dan Ijin Pengelolaan Gas Nasional. Dalam UU no 22 tahun 2001 pengelolaan Gas Nasional diselenggarakan secara terbuka oleh pelaku usaha baik BUMN maupun swasta. Dengan di revisinya UU no 22 tentang Migas ini disambut baik oleh PGN, sebab menjadi bentuk nyata dukungan Pemerintah untuk memproteksi PGN dengan memberikan Regulasi yang mendukung keberlangsungan usaha PGN sebagai BUMN Migas Indonesia yang berkomitmen mendukung Ketahanan Energi Nasional.

Dengan adanya MEA akan memberi peluang pada PGN untuk semakin mengibarkan sayapnya. Pelaksanaan MEA secara otomatis akan mendorong perdagangan menjadi semakin terbuka. Apalagi sudah semakin banyak perusahaan yang beralih dari Bahan bakar industri ke Bahan bakar Gas. Tentu ini akan menjadi peluang yang baik untuk PGN.

MEA merupakan “ajang kompetisi” yang cukup penting dalam mempertahankan eksistensi BUMN dari persaingan bebas produk MNC baik dari Indonesia sendiri maupun dari negara lain. Namun, jika kurang perhitungan yang tepat maka MEA akan dapat menjadi bumerang yang justru akan berbahaya bagi eksistensi BUMN itu sendiri. Maka dari itu, selain dibutuhkan strategi internal dari BUMN tersebut, dibutuhkan juga peran penting pemerintah

dalam menyelamatkan dan mengembangkan BUMN pada umumnya dan PGN secara khusus dalam hal ini, sehingga Perekonomian Indonesia semakin kuat dan maju.

B. Rumusan Masalah

Rumusan Masalah berdasarkan latar belakang dan persoalan yang telah diuraikan di atas, adalah :

“Bagaimana Strategi Indonesia mempersiapkan Perusahaan Gas Negara (PGN) Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN ”

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Kesiapan Indonesia dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN pada 2015.
2. Untuk mengetahui Strategi yang dilakukan Indonesia dalam mempersiapkan PGN untuk menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015.

D. Kerangka Pemikiran / Teori yang digunakan :

Untuk menjawab serta menganalisa pokok permasalahan yang terdapat pada tulisan tersebut penulis menggunakan konsep yang dapat mendukung penulisan karya tulis ini. Dalam penulisannya penulis menggunakan teori Developmental state dari Linda Weiss, dan konsep “Late Comers” dari Matews.

1. Teori Developmental State

Teori *Developmental state* adalah teori yang membahas tentang hubungan antara Negara terhadap kegiatan pembangunan di negaranya. Teori ini menempatkan negara menjadi aktor utama pendorong kegiatan pembangunan di negaranya. Teori ini muncul sejak adanya gagasan *state-led development* dimana negara dituntut untuk memiliki kapabilitas untuk memproteksi dan mempersiapkan kegiatan pembangunan di negaranya sebaik mungkin untuk tercapainya kemakmuran negaranya. Dalam teori ini dianggap bahwa negara memiliki andil penuh dan memiliki peran penting dalam kebijakan perindustrian dan mendorong industri di negaranya mampu bersaing dalam pasar internasional. Menurut Linda weiss, diperlukan sinergi dari pemerintah dan perusahaan industrinya dalam mencapai posisi yang kuat di pasar internasional.

MEA sudah resmi diberlakukan, Pemerintah Indonesia telah mempersiapkan Strategi dalam menghadapi kompetisi ASEAN ini. Salah satunya dengan mengalihkan Energi (Gas Alam) yang awalnya digunakan sebagai Komoditas Ekspor, kini menjadi alat pembangunan, sebagai penunjang keberhasilan Indonesia dalam menghadapi pasar bebas ASEAN. Diperlukan peran pemerintah Indonesia untuk memproteksi dan mempersiapkan perusahaan baik BUMN maupun swasta dinegaranya untuk mencapai posisi yang kuat di pasar ASEAN dalam berkompetisi dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN. Maka dari itu diharapkan Indonesia dapat mendorong aktifitas industrinya kearah yang lebih baik terutama dalam menghadapi MEA.

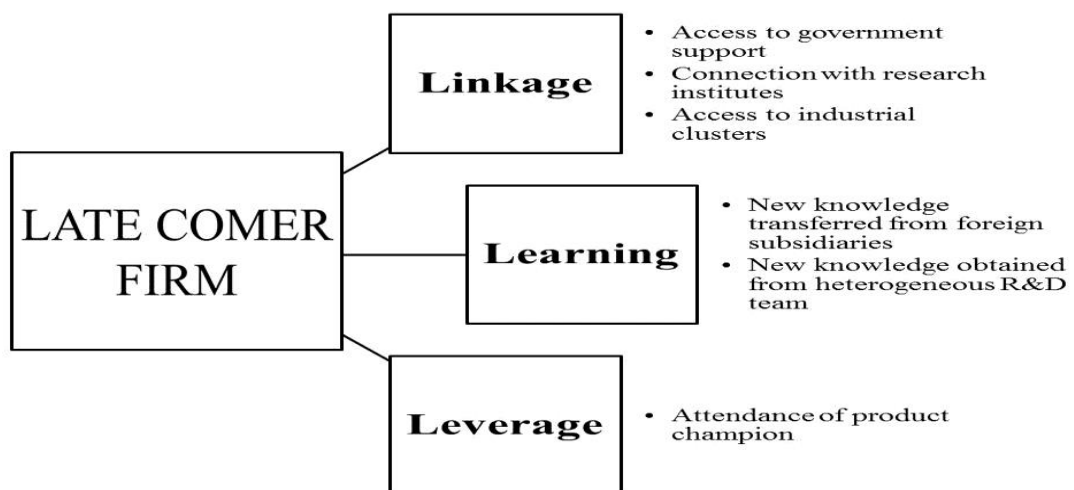
2. Konsep Latecomers Firm

Konsep “Latecomers Firm” dari John A. Matthews ini dapat digunakan untuk perusahaan yang menjadi pendatang baru, yang sebelumnya sudah ada perusahaan disektor yang sama yang terlebih dulu hadir dan beroperasi di pasar internasional

John A. Matthews (2002) menjelaskan bahwa, perusahaan dapat dikategorikan sebagai late comer apabila telah memenuhi kriteria-kriteria berikut:

1. *Industry entry*: Perusahaan tersebut menjadi MNCs bukan karena pilihan melainkan keharusan sejarah.
2. *Resources*: Perusahaan-perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang pada awalnya miskin sumber daya, baik teknologi maupun akses pasar.
3. *Strategic intent*: Perusahaan yang memiliki visi misi untuk maju mengejar ketertinggalannya dengan perusahaan yang telah maju lebih dahulu.
4. *Competitive position*: Perusahaan tersebut telah memiliki nilai kompetisi yang mampu beroperasi dengan biaya rendah namun produktif secara maksimal dan memiliki pengaruh terhadap industri terkait.

Gambar 1.1 Bagan Latecomers Firm Mathews



Sumber: Mathews (2006)

Berdasarkan kerangka linkage-learning-laverage, dapat dipahami bahwa :

1. *Linkage*: Hubungan eksternal *late comer firm* dengan pemerintah, Lembaga penelitian, dan kluster industri.
2. *Learning*: Proses belajar dari MNCs yang sebelumnya telah mapan, transfer pengetahuan dari perusahaan asing, dan juga penciptaan pengetahuan oleh *heterogeneous Research & Development Team*.
3. *Leveraging*: Memanfaatkan sumber daya internal dan eksternal.

Dengan menggunakan Konsep Late Comers Mathews, Untuk dapat optimal menghadapi Kompetisi MEA 2015, maka Pemerintah Indonesia perlu terus memfasilitasi BUMN nya dalam hal ini PGN untuk terus berinovasi dan mengembangkan usahanya. Hubungan baik antara Pemerintah dan BUMN diberikan dalam bentuk regulasi dan proteksi yang mampu menguatkan posisi BUMN dalam menghadapi Pasar Global.

Sehingga, untuk terus dapat eksis dalam Pasar global PGN tidak hanya perlu mengakses sumber daya melalui hubungan eksternal (*external linkage*) yaitu dengan menjalin hubungan yang baik dengan Pemerintah Indonesia maupun Perusahaan yang telah dulu mapan seperti Pertamina, belajar melalui internasionalisasi MNCs yang sudah mapan (*learning*) seperti mengadakan study banding ke MNC yang memiliki teknologi yang lebih baik seperti study PGN ke Blok Fasken, Texas, Amerika Serikat. Tetapi juga, memanfaatkan sumber daya yang ada (*lverage*) yaitu dengan mengoptimalkan Jaringan Infrastruktur Pipa Gas Alam PGN yang merupakan Jaringan Infrastruktur Pipa Gas terbesar di Indonesia, yang menjadi aset utama bagi PGN dalam mengembangkan usahanya.

Dengan memahami kerangka *linkage-learning-leverage* maka akan lebih mudah dalam menganalisa strategi Indonesia dalam memproteksi PGN dalam menghadapi MEA

(Masyarakat Ekonomi ASEAN). Tantangan kompetisi Masyarakat Ekonomi ASEAN merupakan kesempatan yang baik bagi PGN dalam mengibarkan sayapnya di dunia perminyakan di ASEAN, khususnya di Indonesia. Dengan menerapkan konsep “Late Comers” ini diharapkan PGN mampu bersaing dan mempertahankan eksistensinya sebagai BUMN Indonesia yang bergerak di sektor hilir gas bumi yang menyediakan dan mengembangkan dan memanfaatkan gas bumi untuk kebutuhan nasional, baik bagi industri, pembangkit listrik, transportasi maupun kebutuhan rumah tangga. Seiring kenaikan harga BBM, PGN mendukung penuh pemerintah mengkonversi BBM menuju Gas. Dan mendukung Pemerintah dalam menyediakan kebutuhan Energi Nasional khususnya dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015.

E. Hipotesa

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang di kaitkan dengan kerangka pemikiran maka hipotesa sementara adalah:

Pertama, Pemerintah Indonesia memiliki peran penting dalam keberhasilan negaranya menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015.

Kedua, Indonesia Memfasilitasi PGN dalam mengembangkan usahanya dalam menyediakan kebutuhan energi nasional ditengah persaingan MEA 2015.

F. Metodologi Penelitian dan Pengumpulan Data

Dalam skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif yang bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis

faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan suatu fenomena yang diselidiki, mengenai strategi PGN dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015.

Data-data yang diperoleh dalam menulis skripsi ini adalah bersumber dari studi pustaka. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode studi literatur dari buku-buku dan jurnal-jurnal yang mendukung tema skripsi ini. Studi ini diperoleh untuk mendapat landasan teori beserta data-data sekunder yang digunakan untuk menganalisa rumusan masalah. Data-data diperoleh melalui buku-buku literatur hubungan internasional, media masa, artikel-artikel di internet serta tulisan-tulisan karya ilmiah yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.

G. Jangkauan Penelitian

Dalam pembahasan masalah dalam penelitian ini penulis membatasi jangkauan penelitian yaitu Strategi Indonesia dalam mempersiapkan Perusahaan Gas Negara menghadapi MEA 2015, dengan berfokus pada tahun 2007- 2015 saja, yaitu sejak awal mula konversi BBM ke Gas oleh Pemerintah. Dan pada wilayah ASEAN saja, meskipun tidak menutup kemungkinan penulis akan menambahkan waktu dan wilayah lain untuk menambah informasi.

H. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I. Pendahuluan merupakan bab yang memuat alasan pemilihan judul, latar belakang

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, hipotesa, metodologi penulisan dan pengumpulan data, jangkauan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II. Dalam bab ini akan di bahas kelebihan dan kekurangan MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) sebagai sarana untuk mengembangkan potensi ekonomi nasional Indonesia.

BAB III. Dalam bab ini akan dibahas mengenai awal mula sejarah berdirinya PGN sebagai BUMN Indonesia dibidang migas, dan Eksistensinya dalam mempertahankan ketahanan energi gas Nasional.

BAB IV. Dalam bab ini akan dibahas topik utama penelitian skripsi ini, yaitu tentang strategi Indonesia dalam memproteksi PGN dalam menghadapi MEA dari sudut pandang Ilmu Hubungan Internasional.

BAB V. Bab ini merupakan bab akhir yang akan menutup karya tulis ini, berisi rangkuman dari bab sebelumnya serta disusun dalam bentuk kesimpulan.